

ABSTRAK

Media massa sebagai wahana komunikasi sosial acapkali dituntut berperan sebagai institusi yang netral. Ia adalah cermin realitas yang terjadi di masyarakat, sekaligus wahana atau tempat terjadinya pertukaran informasi. Sebagai institusi pemberitaan, selama masa kampanye Pemilu 1997, berita-berita kampanye yang ada di media massa Indonesia disinyalir kurang memperlihatkan netralitas dalam menyajikan kuantitas dan kualitas pemberitaannya. Penelitian ini sedianya ingin mengetahui menguji kebenaran sinyalemen itu. Apakah sinyalemen tersebut secara empiris dapat dibuktikan ataukah tidak? Dengan demikian penelitian ini berupaya mencari data-data empiris yang dapat digunakan untuk memperkuat atau menolak sinyalemen ketidaknetralan media massa tadi.

Persoalan penelitian di atas dicoba untuk dikaji secara kuantitatif dengan menggunakan metode analisis isi (*content analysis*). Atau dengan kata lain penelitian ini berusaha melakukan perhitungan dan analisis terhadap semua pemberitaan Organisasi Peserta Pemilu (OPP) selama masa kampanye 1997 di empat media cetak dan tiga media elektronik televisi. Yaitu surat kabar Kompas, Jawa Pos, Surya dan Republika, serta pemberitaan di TVRI, RCTI, dan SCTV.

Hasilnya, sinyalemen tidak netralnya media massa dalam pemberitaan kampanye Pemilu 1997 terbukti.. Temuan dan analisis data memperlihatkan adanya kecenderungan pada media cetak maupun elektronik menampilkan pemberitaan yang secara kuantitatif memberikan porsi yang lebih banyak kepada Golkar dibanding PPP dan PDI. Surat kabar Kompas, Republika, dan Jawa Pos, secara nyata terbukti memberikan porsi yang lebih banyak serta pemberitaan yang lebih "menguntungkan" kepada Golkar. Hanya harian Surya yang agak berbeda, yaitu dengan memberikan porsi lebih banyak bagi PPP dibanding Golkar dan PDI. Sementara untuk pemberitaan televisi, ketidaknetralan media ini jauh lebih nampak daripada media cetak. TVRI, RCTI maupun SCTV, memberitakan Golkar 2 kali lebih banyak dan lebih lengkap dari pada untuk PDI dan PPP. Golkar jauh lebih diuntungkan oleh pemberitaan media elektronik ini dibanding OPP lain. Sementara PPP merupakan OPP yang paling sedikit dan tidak "diuntungkan" oleh pemberitaan ketiga televisi yang diteliti.

Walhasil dengan data-data empiris dari penelitian ini, diharapkan dapat menjadi masukan bagi pengelola media massa untuk meningkatkan profesionalitas jurnalistiknya. Yaitu berupaya semaksimal mungkin menyajikan berita politik yang lebih obyektif, dan netral. Karena netralitas pemberitaan politik telah menjadi tuntutan demokratisasi, serta tuntutan perkembangan profesionalitas media massa itu sendiri.